

LAPORAN TAHUNAN  
PENELITIAN FUNDAMENTAL



KAJIAN TINDAK TUTUR ETNIS MINANGKABAU  
DAN TIONGHOA (CINA) DI KOTA PADANG: Upaya Penciptaan Saling  
Paham untuk Pencegahan Konflik dan Disintegrasi Bangsa

Tahun ke-1 dari Rencana 2 Tahun

TIM PENGUSUL

Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum., NIDN 0012026906 (Ketua)

Dra. Emidar, M.Pd., NIDN 0018026205 (Anggota)

Dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Padang  
sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Desentralisasi

Melalui DIPA UNP Tahun 2013

Nomor: 298.b.4/UN35.2/PG/2013 Tanggal 15 Mei 2013

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Desember, 2013

## ABSTRAK

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multi etnis dan multi budaya. Oleh karena bangsa Indonesia multi etnis dan multi budaya itu, integrasi dan penyatuan berbagai etnis dan budaya perlu dilakukan secara terus-menerus dengan memahami berbagai kesamaan dan saling paham. Salah satu bentuk upaya pencegahan terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa perlu dilakukan kajian tindak tutur (komunikasi) antaretnis di perkotaan. Tujuan penelitian yakni (1) untuk menemukan karakteristik **bentuk sapaan** etnis Minangkabau dan etnis Tionghoa yang hidup berdampingan di Kota Padang; (2) untuk menemukan karakteristik **bentuk fatis** etnis Minangkabau dan etnis Tionghoa yang hidup berdampingan di Kota Padang. Metode yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah tokoh masyarakat kedua etnis yang ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Data penelitian tentang karakteristik bentuk sapaan dan bentuk fatis etnis Minangkabau dan etnis Tionghoa di Kota Padang dikumpulkan dengan wawancara mendalam menggunakan metode cakap dengan teknik simak, teknik rekam, dan teknik catat. Analisis data dilakukan dengan cara berikut: (1) identifikasi data, (2) klasifikasi data, (3) interpretasi data, (4) penyimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, etnis Minangkabau mempunyai bentuk sapaan dan bentuk fatis yang santun sesuai dengan karakteristik budaya lokal Minangkabau. Kedua, etnis Tionghoa mempunyai bentuk sapaan dan bentuk fatis yang santun sesuai dengan karakteristik budaya lokal Tionghoa di Kota Padang. Bentuk sapaan dan bentuk fatis yang santun tersebut perlu saling dipahami dan digunakan ketika berkomunikasi antaretnis tersebut.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan yang Diteliti .....	4
C. Urgensi Penelitian .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>14</b>
A. Tujuan Penelitian .....	14
B. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB 4. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>16</b>
A. Jenis dan Metode Penelitian .....	16
B. Objek, Data Penelitian, dan Sumber Data .....	16
C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	16
D. Teknik Pengabsahan Data .....	17
E. Teknik Analisis Data .....	18
<b>BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>19</b>
A. Hasil Penelitian .....	19
1. Bentuk Sapaan dan Fatis Etnis Minangkabau di Kota Padang .....	19
2. Bentuk Sapaan dan Fatis Etnis Tionghoa di Kota Padang .....	27
B. Pembahasan .....	34

1. Bentuk Sapaan dan Fatis Etnis Minangkabau di Kota Padang.....	34
2. Bentuk Sapaan dan Fatis Etnis Tionghoa di Kota Padang .....	52

<b>BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....</b>	<b>68</b>
---	-----------

<b>BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
---	-----------

A. Kesimpulan.....	70
--------------------	----

B. Saran.....	71
---------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

## BAB 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah dengan kebijakan desentralisasi memiliki dampak positif dan negatif terutama bagi etnis dan budayanya di Indonesia. Dampak positif otonomi daerah tersebut misalnya memberikan kesempatan komunitas lokal untuk mengekspresikan budayanya masing-masing sebagai basis dalam mengembangkan sistem, kebijakan dan struktur politik di daerah. Jadi, komunitas lokal, etnis, dan kelompok budaya dapat menentukan arah kebijakan yang dikembangkan oleh daerah dan merupakan upaya rekonstruksi budaya lokal dengan menghindari penyeragaman dari pemerintah pusat. Kohar (2010:2) menyatakan implikasi pelaksanaan otonomi daerah adalah berikut ini: (1) komunitas daerah akan semakin merasa "*at home*", yang selanjutnya mempengaruhi pengakuan mereka terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) pemerintah pusat akan mengembangkan pola manajemen Indonesia dengan sistem politik di daerah-daerah otonomi yang beragam, sehingga ketegangan-ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah akan dapat dihindarkan, karena telah membuat "kontrak sosial" berupa pengakuan atas nilai-nilai budaya lokal.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multi etnis dan multi budaya. Oleh karena bangsa Indonesia multi etnis dan multi budaya itu, integrasi dan penyatuan berbagai etnis dan budaya perlu dilakukan secara terus-menerus dengan memahami berbagai kesamaan dan saling paham. Penguatan desentralisasi sejak

orde reformasi telah memunculkan dampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik antaretnis dan budaya sangat mudah dan sering terjadi di perkotaan yang terdiri atas beberapa etnis dan budaya. Selain itu, konflik antaretnis dan budaya di wilayah perbatasan kabupaten, provinsi, dan di wilayah transmigrasi juga sangat mudah dan sering terjadi. Salah satu bentuk upaya pencegahan terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa perlu dilakukan kajian tindak tutur (komunikasi) antaretnis baik di perkotaan yang multi etnis dan budaya maupun di daerah perbatasan dengan beberapa etnis yang hidup berdampingan.

Pencegahan konflik antaretnis dan disintegrasi bangsa perlu dikembangkan dan dikomunikasikan secara berkesinambungan. Sejalan dengan itu, Hatta (2006) menyatakan harapan agar dapat segera merespons dan mensosialisasikan realitas kemajemukan dan pendidikan multikultural dalam masyarakat Indonesia, antara lain dengan: (1) meningkatkan pemahaman serta mensosialisasikan komitmen multikultural yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai metode dan strategi; (2) menjadi pendidik dan pembimbing masyarakat dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai positif seperti kesetaraan, kebersamaan, kepedulian kepada sesama manusia, cinta tanah air, dan lain-lain; (3) melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dapat mendorong praktik-praktik peningkatan gotong-royong, kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak.

Bahasa adalah bagian integral dari budaya suatu kelompok, karena itu unsur-unsur budaya seperti aturan, kebiasaan, dan cara hidup kelompok dapat